

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan dasar pemikiran dalam memahami konsep *corporate governance*. Menurut Jansen dan Meckling (1976), hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih *principal* mempekerjakan orang lain (*agent*) agar melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan mereka dan kemudian mendelegasikan beberapa kebijakan wewenang dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibanding pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan (Panjaitan & Muslih, 2019).

Teori keagenan menjelaskan bahwa di dalam hubungan keagenan tersebut terdapat perbedaan kepentingan antara pihak pemegang saham selaku *principal* dan pihak manajer selaku *agent*. Konflik kepentingan ini terjadi karena kemungkinan *agent* tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan *principal* (Suheny, 2019). Kedua belah pihak ini terpisah dan menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi diri mereka

sendiri tetapi tidak demikian mungkin (Wardoyo *et al.*, 2021). *Principal* berharap sumber daya perusahaan yang telah didelegasikan dapat dikelola dengan baik dan benar oleh *agent*, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum. Sedangkan *agent* sebagai pengelola perusahaan mempunyai informasi yang lebih terkait dengan kondisi perusahaan akan meningkatkan perilaku *oportunistic* untuk mementingkan kepentingan pribadi (Warno & Fahmi, 2020). *Principal* dalam hal ini pemegang saham akan sulit untuk mengontrol secara efektif perilaku manajemen karena hanya memiliki informasi yang terbatas.

Hasil penelitian Said *et al.* (2022) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang transparan sangat diperlukan untuk mengurangi masalah keagenan. Hal ini dapat dijadikan bukti bahwa tidak adanya informasi yang disembunyikan. Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh *agent* sebagai pertanggung jawaban kinerjanya, *principal* dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana *agent* tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya dan serta sebagai dasar pemberian kompensasi kepada *agent* (Suheny, 2019). *Agency theory* ini relevan untuk menjelaskan adanya kecurangan laporan keuangan dalam perseroan. Masalah keagenan yang ditimbulkan dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan yang dilaporkan dan berdampak pada terjadinya tindakan kecurangan laporan keuangan (Syafitri *et al.*, 2021).

2.1.2 Konsep Kecurangan

Kecurangan (*fraud*) adalah setiap kegiatan yang mengandalkan tipu daya untuk memperoleh keuntungan. Kecurangan menjadi kejahatan ketika merupakan kegiatan melakukan kesalahan penyajian atau menyembunyian fakta material yang disengaja untuk mendorong orang lain melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri (ACFE, 2024a). *Fraud* berbeda dengan kesalahan yang tidak disengaja (*unintentional error*). Jika seorang secara tidak sengaja memasukkan data yang salah ketika mencatat suatu transaksi, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai *fraud* karena dilakukan dengan tidak sengaja. Tetapi jika seseorang dengan kecerdikannya, merekayasa laporan keuangan untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi pada perusahaannya maka disebut *fraud* (Faradiza, 2019).

Kecurangan merupakan masalah global yang mempengaruhi organisasi di setiap wilayah dan industri di seluruh dunia. Mengukur tingkat sebenarnya dari kerugian yang disebabkan oleh kecurangan dapat menjadi suatu tantangan karena sifat menyembunyian dan persekongkolan yang melekat dalam sebagian besar skema (ACFE, 2024b). ACFE membagi kecurangan kedalam 3 bentuk yaitu *Asset Misappropriation* atau penyalahgunaan aset, *Corruption* atau tindak korupsi, dan *Fraudulent Financial Reporting* atau kecurangan laporan keuangan.

Kecurangan atau manipulasi yang dilakukan dalam pelaporan keuangan diartikan sebagai kegiatan yang disengaja dalam laporan keuangan sehingga berakibat pada salah saji material (M. Ratnasari & Rofi, 2020). Menurut ACFE, kecurangan laporan keuangan adalah skema di mana seorang karyawan dengan sengaja menyebabkan salah saji atau kelalaian informasi material dalam laporan keuangan organisasi. Dalam praktiknya kecurangan pada laporan keuangan terdiri dari manipulasi catatan keuangan, kesengajaan untuk menghilangkan kejadian, transaksi, akun atau informasi signifikan lain, kesalahan penerapan prinsip akuntansi, kebijakan atau prosedur yang digunakan untuk mengukur, mencatat, melaporkan dan mengungkapkan transaksi sehingga menimbulkan *overstatement* atau *understatement* (Yanti, 2021).

Salah satu faktor yang mengakibatkan kecurangan laporan keuangan ini ialah masalah yang muncul antara pihak pemegang saham (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*) (Febrianto & Suryandari, 2022). Masalah yang timbul dari hubungan keagenan ini sebenarnya bermula dari keinginan *agent* untuk tidak bertindak demi kepentingan terbaik *principal*. *Agent* sebagai pihak yang memiliki informasi mengenai kondisi perusahaan tidak akan memberikan seluruh informasi yang dimilikinya kepada *principal* karena berbagai alasan seperti kendala biaya penyajian informasi, waktu penyajian laporan, keinginan

memaksimalkan keuntungannya sendiri dan keinginan untuk menghindari risiko menunjukkan kelemahan (Prasetyo, 2022).

2.1.3 Corporate Governance

Tata kelola perusahaan adalah kumpulan mekanisme pengendalian yang diterapkan suatu organisasi untuk mencegah atau menghalangi manajer yang berpotensi memiliki kepentingan pribadi untuk terlibat dalam aktivitas yang merugikan kesejahteraan pemegang saham dan pemangku kepentingan akibat perbedaan kepentingan *principal* dan *agent* (Larcker & Tayan, 2020). Tata kelola perusahaan telah menjadi salah satu ungkapan yang paling umum digunakan dalam bisnis global. Kelemahan dalam tata kelola perusahaan diidentifikasi sebagai alasan utama dan penyebab krisis keuangan. Remunerasi eksekutif yang berlebihan, struktur insentif yang tidak tepat, kegagalan dalam manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, lemahnya pemantauan, kurangnya independensi di dewan direksi dan kurangnya etika direksi menjadi penyebab jatuhnya banyak perusahaan besar di dunia (Solomon, 2020).

Menanggapi fenomena global tersebut, pemerintah Indonesia kemudian membuat kebijakan untuk menerapkan konsep tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance—GCG*) dalam pengelolaan perusahaan. Salah satunya adalah dengan mendirikan *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) pada tanggal 2 Juni 2000 yang merupakan lembaga independen untuk mengembangkan GCG di

Indonesia. Prinsip-prinsip GCG terbukti berpengaruh positif dalam pencegahan kecurangan (Rowa & Arthana, 2019).

Tata kelola perusahaan yang baik menerapkan prinsip-prinsip **keterbukaan** (prinsip yang mengutamakan keterbukaan dalam mengungkapkan semua informasi dengan tepat waktu dan akurat serta keterbukaan organisasi dalam pengambilan keputusan), **akuntabilitas** (prinsip yang mengatur tugas dan pelaksanaan tanggung jawab dalam perusahaan/organisasi agar dapat dikelola dengan baik), **pertanggungjawaban** (prinsip yang menuntut agar pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat serta taat aturan), **independensi** (pelaksanaan tugas dalam memenuhi tanggung jawab di perusahaan yang bebas tanpa pengaruh, tanpa bentrokan kepentingan maupun tekanan) dan **kewajaran/ fairness** (pemenuhan hal pemegang saham secara adil dan setara sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Herawaty & Hernando, 2021)

Hasil penelitian Sari *et al.* (2022) menunjukkan bahwa prinsip independensi memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mencegah kecurangan, senada dengan penelitian Rowa dan Arthana (2019) yang menunjukkan bahwa prinsip independensi memiliki signifikansi 26,49%, paling besar dibanding prinsip yang lain yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dan *Fairness*. Oleh karena itu, prinsip *corporate governance* yang ditekankan dalam penelitian ini

adalah prinsip independensi yang diproksikan melalui 4 variabel yaitu dewan komisaris independen, komite audit, auditor internal serta auditor eksternal.

2.1.3.1 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan agen pengawas seperti dewan komisaris umum tetapi tidak memiliki hubungan dekat dengan pemegang saham perusahaan yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan melindungi pemegang saham minoritas dan berperan penting dalam proses pengambilan keputusan (Intia & Azizah, 2021). Sebagai salah satu organ perusahaan, dewan komisaris independen bersamaan dengan seluruh anggota dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi tindakan direksi juga berhak memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris independen mengawasi direksi demi melindungi kepentingan pemegang saham dan perusahaan itu sendiri dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, dan memantau efektifitas penerapan GCG yang dilaksanakan perusahaan.

Untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan, tentunya perusahaan memerlukan badan pengawas dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Maka dari itu, dibentuklah dewan komisaris

independen yang mempunyai tugas pengawasan dan tidak terikat atau terpengaruh oleh perusahaan yang diawasinya (Syafitri *et al.*, 2021). Oleh karena itu, mereka lebih cenderung untuk bertindak secara independen dan sebagai pemisah kepentingan antara *principal* dan *agent*. Sebagai mediator antara manajer, auditor, dan pemangku kepentingan, komisaris independen dipercaya untuk menyeimbangkan kepentingan pemangku kepentingan mayoritas dan minoritas. Lebih jauh, komisaris independen berkontribusi pada penyusunan rencana strategis jangka panjang perusahaan dan evaluasi berkala atas pelaksanaannya. Dewan komisaris akan lebih mampu mengawasi manajemen sehingga menurut teori keagenan, adanya komisaris independen akan memicu korelasi negatif dengan kecurangan pelaporan keuangan (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023).

2.1.3.2 Komite Audit

Komite audit adalah sebuah departemen yang dibentuk dengan tujuan utama sebagai pemberi bantuan kepada dewan komisaris dalam hal pelaksanaan monitoring yang berpedoman dengan prinsip *good corporate governance* mulai dari mengenai informasi yang bersifat *financial* maupun *non financial* seperti pengendalian internal dan risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Anggota komite

audit harus berintegritas, memahami bisnis perusahaan, laporan keuangan, dan prosedur hukum (Sari & Husadha, 2020).

Ada beberapa tujuan umum dari pembentukan komite audit, antara lain untuk mengembangkan kualitas laporan keuangan, memastikan bahwa direksi membuat keputusan berdasarkan kebijakan, praktik dan pengungkapan akuntansi, menelaah ruang lingkup dan hasil dari audit internal dan eksternal, dan mengawasi proses pelaporan keuangan (Meini & Istikharoh, 2022). Hal tersebut membantu pencegahan masalah keagenan yang terjadi sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dan *agent*, seperti celah untuk melakukan kecurangan untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok. Kegunaan dari komite audit adalah memastikan bahwa sistem pengendalian internal dari perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Triyani *et al.*, 2019)

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal. Semakin tinggi jumlah komite audit didalam internal perusahaan maka praktik kecurangan laporan keuangan akan semakin berkurang (Bii, 2024). Efektivitas komite audit menjadi salah satu elemen paling

penting dalam mekanisme *corporate governance*, komite audit yang mempunyai efektivitas lebih tinggi memiliki kemampuan lebih baik untuk memantau manajemen, melindungi kepentingan pemegang saham dan membantu membatasi praktik kecurangan laporan keuangan (Kapkiyai *et al.*, 2020)

2.1.3.3 Auditor Internal

Audit internal adalah bagian dari perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan membantu manajemer dalam menganalisis dan melakukan perbaikan prosedur *internal control* perusahaan yang berisiko menimbulkan celah terjadinya praktik yang merugikan dan rentan dimanfaatkan untuk manipulasi. Audit internal merupakan prosedur bisnis penting yang terkait erat dengan pengendalian internal baik dalam ranah *financial* maupun *non financial*. Mengingat dampak signifikan audit internal terhadap pengendalian internal perusahaan, perusahaan diharapkan mampu mempertahankan audit internal yang memadai dan meningkatkan kinerja pengendalian internal (Nina *et al.*, 2024).

Audit internal membantu organisasi mencapai tujuan pelaporan keuangannya dengan memberikan rincian sistematis tentang apa yang dilakukan di perusahaan dan bagaimana seharusnya dilakukan. Dengan audit internal yang bertindak

sebagai pengawas operasi keuangan perusahaan, praktik pelaporan keuangan pun menjadi lebih baik (Kaawaase *et al.*, 2021). Audit internal sangat diperlukan dalam suatu organisasi karena berperan dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Auditor internal sebagai orang yang independen harus mampu melakukan pemeriksaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan (Bangun *et al.*, 2024).

Keberadaan audit internal juga mampu menjalankan fungsi kontrol dan mengidentifikasi kemungkinan adanya “*red flags*” apabila ada peluang terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan. Audit internal merupakan jaminan, independen, objektif dan aktivitas konsultasi yang digunakan sebagai alat dalam meningkatkan efektivitas perusahaan (Syifa & Ghina, 2022).

2.1.3.4 Auditor Eksternal

Auditor profesional yang bekerja dengan masyarakat umum, terutama di bidang audit laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya, dikenal sebagai auditor eksternal. Investor, organisasi pemerintah, dan masyarakat umum termasuk di antara pengguna data keuangan perusahaan sangat bergantung pada auditor eksternal untuk memberikan opini objektif mengenai data dan informasi yang terkandung dalam laporan

keuangan karena independensinya yang tinggi. Akuntan ini bertugas meninjau atau mengaudit laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu organisasi dan memberikan opini atas data yang mereka periksa. Auditor eksternal dapat bekerja untuk perusahaan akuntansi publik atau secara independen. Karena mereka tidak bekerja untuk organisasi yang diaudit, mereka disebut eksternal. Laporan keuangan perusahaan publik dan swasta wajib diperiksa oleh auditor eksternal sebelum dipublikasi ke masyarakat (Utami *et al.*, 2024).

Reputasi auditor eksternal dipandang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Kantor akuntansi dengan reputasi baik (*Big 4*) biasanya memiliki keunggulan dalam hal personel profesional dan keadaan dan cenderung memberikan jasa audit yang efektif untuk mempertahankan reputasi mereka (Riyanti *et al.*, 2019). Oleh karena itu, perusahaan audit yang besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan pelaporan manajemen yang tidak benar karena pihak manajemen.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan proses pengklasifikasian suatu perusahaan kedalam 2 bentuk yaitu, perusahaan yang berukuran besar dan perusahaan berukuran kecil. Ukuran perusahaan merupakan salah

satu variabel yang paling penting dalam menjelaskan keberagaman dalam pengungkapan. Perusahaan besar ataupun kecil dapat terlihat melalui seberapa banyak perusahaan memiliki total aset karena aset bersifat jangka panjang (Wardita *et al.*, 2021). Perusahaan yang memiliki ukuran besar akan membuat seorang investor menaruh perhatian yang besar pada perusahaan tersebut. Kondisi tersebut dapat terjadi karena perusahaan besar cenderung mempunyai kondisi yang semakin baik. Kondisi perusahaan yang baik dapat membuat investor ingin memiliki saham perusahaan karena berharap memperoleh dividen yang semakin tinggi dari perusahaan yang memiliki ukuran besar (Sulistyo Rahayu *et al.*, 2020).

Kemampuan perusahaan yang memudahkan aliran uang dari sumber internal maupun eksternal akan ditunjang oleh ukuran atau skalanya. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan bahwa bisnis tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik, yang meningkatkan nilai perusahaan dan pada akhirnya akan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dalam rangka pendanaan (Dewantari *et al.*, 2020). Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi terjadinya praktik manipulasi laporan keuangan karena semakin besar suatu perusahaan, semakin perusahaan itu harus mampu memenuhi ekspektasi dari investor atau pemegang sahamnya. Perusahaan yang besar juga menarik perhatian banyak orang, oleh karena itu, mereka harus menjaga reputasi dan kepercayaan investor sehingga memiliki

kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan kecurangan (Xiong *et al.*, 2021).

2.1.5 Leverage

Leverage berkaitan dengan penggunaan sumber daya keuangan seperti utang dan peminjaman dana guna meningkatkan pengembalian ekuitas. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (Mardianto & Tiono, 2019).

Leverage yang besar menunjukkan bahwa perusahaan semakin terbebani dengan utang, hal ini berimpas pada tindakan *agent* yang cenderung mencatat pendapatan fiktif dan melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan kepada *principal* bahwa mereka mampu melunasi kewajibannya. *Leverage* yang tinggi meningkatkan tekanan yang dirasakan manajemen dan disaat yang bersamaan juga meningkatkan risiko kecurangan laporan keuangan (Izzalqurny *et al.*, 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada setiap penelitian, tentunya akan ditemukan berbagai perbedaan yang mendasari penelitian tersebut. Baik dari variabel dependen (terikat)

maupun variabel independen (bebas). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang lain dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Muhamad Wahfiudin, Imam Subekti (2023)	Pengaruh Kualitas Audit Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	Penelitian ini membahas <i>corporate governance</i> sebagai salah satu variabel X dan kecurangan pelaporan keuangan sebagai variabel Y	Penelitian ini tidak mengambil perusahaan pertambangan sebagai sampel dan tidak mengukur <i>corporate governance</i> dengan efektivitas komite audit dan audit internal.	Kepemilikan manajerial, kepemilikan instutusional dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan sedangkan indikator lain yaitu komisaris independen terbukti dapat menghambat kecurangan laporan keuangan.
2	M.Syafitri, H.N.L Ermaya, A.M Putra (2021)	Dampak <i>Corporate Governance</i> , <i>Financial Stability</i> , dan <i>Financial Target</i> dalam Kecurangan Laporan Keuangan	Penelitian ini membahas <i>corporate governance</i> sebagai salah satu variabel X dan kecurangan pelaporan keuangan sebagai variabel Y	Penelitian ini tidak menghitung kecurangan laporan keuangan dengan <i>Beneish M-Score</i> tetapi menggunakan <i>Modified Jones Model</i>	Dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan instutusional, <i>financial target</i> , serta variabel kontrol berupa <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, <i>financial stability</i> berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.
3	Pratiwi Nila Sari,	Pengaruh <i>Corporate</i>	Penelitian ini membahas <i>corporate</i>	Penelitian ini tidak menghitung	Dewan komisaris dan KAP <i>big four</i> memiliki pengaruh

	Cahyadi Husadha (2020)	<i>Governance</i> terhadap Indikasi <i>Fraud</i> Dalam Pelaporan Keuangan	<i>governance</i> sebagai salah satu variabel X dan kecurangan pelaporan keuangan sebagai variabel Y	kecurangan berdasarkan laporan keuangan namun mengambil data perusahaan yang melakukan kecurangan dan tidak mengambil sektor pertambangan sebagai sampel.	positif dan signifikan terhadap indikasi kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pelaporan keuangan. Sedangkan variabel komisariss independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indikasi <i>fraud</i> . Variabel komite audit dan audit internal tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi kecurangan dalam pelaporan keuangan. Secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa <i>corporate governance</i> terbukti dapat dijadikan kontrol bagi pemegang saham dalam mengurangi kecurangan dalam pelaporan keuangan.
4	Zirda Kurnia (2023)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Infrastrukt	Penelitian ini membahas <i>corporate governance</i> sebagai salah satu variabel X dan kecurangan pelaporan keuangan sebagai variabel Y	Penelitian ini tidak mengambil perusahaan pertambangan sebagai sampel dan tidak mengambil variabel audit internal dan eksternal sebagai ukuran <i>corporate governance</i>	Menurut temuan penelitian, kecurangan laporan keuangan secara signifikan dipengaruhi oleh komite audit dan dewan komisaris. Namun, kecurangan laporan keuangan tidak secara signifikan dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Lebih jauh, hubungan antara komite audit dan dewan komisaris

		ur, Utilitas, Dan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021			tentang kecurangan laporan keuangan dapat diperkuat oleh ukuran organisasi. Namun, hubungan antara kepemilikan institusional dan kecurangan laporan keuangan juga dilemahkan oleh ukuran organisasi.
5	Dany Panji Guritno, Diah Probowulan, Astrid Maharani (2020)	Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Variabel <i>corporate governance</i>	Penelitian ini membahas <i>corporate governance</i> dan Kecurangan Pelaporan Keuangan menggunakan metode <i>Beneish M-Score</i>	Penelitian ini tidak membahas indikator audit internal dan eksternal sebagai ukuran <i>corporate governance</i> dan tidak memakai perusahaan pertambangan sebagai sampel.	Variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit independen tidak berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan

Sumber : Peneliti, 2024

2.3 Hipotesis

2.3.1 Komposisi Dewan Komisaris Independen dan *Fraudulent Financial Reporting*

Secara umum, dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris dan merupakan individu-individu di luar organisasi. Komposisi minimum dewan komisaris independen adalah 30% dari keanggotaan dewan komisaris. Sebagai dewan komisaris independen, mereka tidak mengalami tekanan oleh organisasi internal

perusahaan meskipun tidak terlibat dalam kegiatan operasi sehari-harinya. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung untuk bertindak secara independen dan sebagai pemisah kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Husadha (2020) menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris independen yang lebih rendah dibanding perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Nasir *et al.* (2019) dan Fitri *et al.* (2019) juga menemukan bahwa perusahaan yang terbukti melakukan kecurangan secara signifikan meningkatkan proporsi direktur independen di dewan mereka. Dengan adanya dewan komisaris independen, maka dapat menjamin transparansi laporan keuangan sehingga pemegang saham mendapatkan informasi yang berkualitas. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H1: Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *fraudulent financial reporting*.

2.3.2 Efektivitas Komite Audit dan *Fraudulent Financial Reporting*

Komite audit merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu organisasi, OJK mengharuskan perusahaan publik untuk membentuk komite audit independen untuk membantu organisasi dalam meningkatkan independensi dan integritas pelaporan keuangan. Berdasarkan studi Kurnia (2023) efektivitas komite audit dapat

mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kapkiyai *et al.* (2020) serta Sijabat dan Tamba (2021) yang menemukan bahwa komite audit memainkan peran penting sebagai monitor dimana efektivitas komite audit berpengaruh signifikan dalam mencegah praktik manajemen laba. Efektivitas komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menggabungkan 2 proksi dari karakteristik komite audit yaitu jumlah anggota komite audit dan frekuensi rapat komite audit.

Dalam peraturan OJK no. 55 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, jumlah anggota komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Studi oleh Ursula *et al.* (2021) membuktikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba sehingga semakin banyak anggota komite audit, maka praktik kecurangan manajemen semakin rendah. Hasil ini senada dengan penelitian Bii (2024) yang menemukan bahwa perusahaan non manipulator memiliki ukuran komite audit yang lebih besar dibanding perusahaan manipulator.

Komite audit juga melakukan rapat rutin paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan, pelaksanaan rapat ini diharapkan dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab komite audit dalam mengamati proses pelaporan keuangan dan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan (OJK, 2015).

Hasil penelitian Purwiyanti dan Laksito (2022) dan Sijabat dan Tamba (2021) menunjukkan bahwa variabel komite audit yang diukur dengan frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Nasir *et al.* (2019) juga mendukung pernyataan ini dengan mengemukakan bahwa perusahaan dengan kasus kecurangan secara signifikan meningkatkan frekuensi rapat komite audit mereka. Sehingga, berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

H2 : Efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap *fraudulent financial reporting*.

2.3.3 Efektivitas Audit Internal dan *Fraudulent Financial Reporting*

Audit internal merupakan proses yang sangat penting bagi perusahaan dan tidak dapat dipisahkan dengan pengendalian internal baik dalam aspek keuangan ataupun non-keuangan (Nina *et al.*, 2024). Semakin efektif audit internal, maka pengendalian internal keuangan dan non-keuangan perusahaan akan semakin baik sehingga mampu mengurangi risiko terjadinya praktik manipulasi laporan keuangan. Studi yang dilakukan Marfiana dan Gunarto (2021) juga Harefa (2023) menunjukkan bahwa efektivitas audit internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga efektivitas audit internal dapat mengurangi kemungkinan kecurangan laporan keuangan (Sari & Husadha, 2020). Dalam penelitian ini, efektivitas audit internal

diukur dengan jumlah auditor internal dan keahlian keuangan kepala audit internal.

Penelitian Utami *et al.* (2024) menunjukkan bahwa auditor internal memiliki peran positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Semakin banyak auditor internal terlibat dalam memantau keandalan pelaporan keuangan, semakin baik kualitas pelaporan keuangan. Keahlian keuangan kepala audit internal juga menjadi dasar awal dalam menentukan seberapa baik kualitas kerja departemen audit internal. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3 : Efektivitas audit internal berpengaruh negatif terhadap *fraudulent financial reporting*.

2.3.4 Kualitas Auditor Eksternal dan *Fraudulent Financial Reporting*

Audit eksternal dipandang sebagai ujung tombak pelaksanaan audit dan orang kepercayaan investor untuk menjamin kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Sehingga, semakin baik kualitas auditor eksternal maka laporan keuangan dapat lebih dipercaya dimata investor. Ursula *et al.* (2021) menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba, senada dengan penelitian Ratih dan Kuntadi (2024) yang membuktikan bahwa *KAP Big 4* memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Pernyataan ini juga didukung oleh literatur lain dari Marlindah dan Wahyono (2020) yang menemukan bahwa ukuran KAP

berpengaruh positif terhadap kualitas audit laporan keuangan sehingga kebenarannya lebih dipercaya oleh investor.

Kualitas audit eksternal telah difokuskan terutama pada perbedaan antara perusahaan audit yang tergolong besar dengan perusahaan audit yang tidak besar. Kantor akuntansi dengan reputasi baik (*Big 4*) biasanya memiliki keunggulan dalam hal personel profesional dan cenderung memberikan jasa audit yang efektif untuk mempertahankan reputasi mereka (Riyanti *et al.*, 2019). Oleh karena itu, perusahaan audit yang besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan pelaporan manajemen yang tidak benar. Maka hipotesis berikutnya adalah :

H4 : Kualitas audit eksternal berpengaruh negatif terhadap *fraudulent financial reporting*.

2.3.5 Ukuran Perusahaan dan *Fraudulent Financial Reporting*

Ukuran perusahaan merupakan proses pengklasifikasian suatu perusahaan kedalam 2 bentuk yaitu, perusahaan yang berukuran besar dan perusahaan berukuran kecil. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi terjadinya praktik manipulasi laporan keuangan karena semakin besar suatu perusahaan, semakin perusahaan itu harus mampu memenuhi ekspektasi dari investor atau pemegang sahamnya.

Studi yang dilakukan oleh Kakati dan Goswami (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kecurangan yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan ukuran

kecil lebih cenderung untuk melakukan kecurangan untuk menarik dan menyenangkan investor. Hal ini didukung oleh Wang *et al.* (2019) dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki ukuran yang lebih kecil. Perusahaan besar menarik perhatian banyak orang sehingga memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan kecurangan (Xiong *et al.*, 2021). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis selanjutnya adalah sebagai berikut :

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *fraudulent financial reporting*.

2.3.6 Leverage dan *Fraudulent Financial Reporting*

Leverage berkaitan dengan penggunaan sumber daya keuangan seperti utang dan peminjaman dana guna meningkatkan pengembalian ekuitas. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Tekanan akan dirasakan manajemen saat tingkat hutang usaha tinggi sehingga akan memungkinkan untuk terjadinya kecurangan (Mardianto & Tiono, 2019).

Perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki tekanan *leverage* yang besar (Fitri *et al.*, 2019). Hal ini didukung oleh penelitian Sari dan Irawati (2021), Kakati dan Goswami (2019) juga

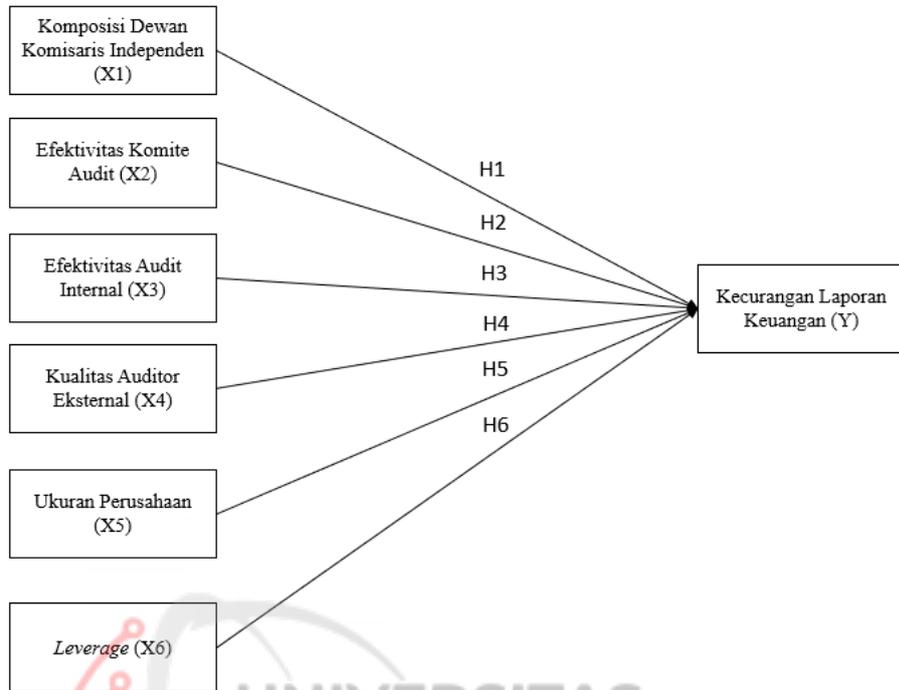
Puspitanigrum *et al.* (2019) yang menemukan bahwa tekanan eksternal yang di proksikan oleh *leverage* dengan menggunakan rumus *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sehingga, hipotesis terakhir yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H6 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan variabel independen yaitu *corporate governance* yang diproksikan melalui 4 variabel terdiri dari komposisi dewan komisaris independen, efektivitas komite audit, efektivitas audit internal serta kualitas auditor eksternal, ditambah dengan 2 variabel independen lain yakni ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap 1 variabel dependen yaitu kecurangan laporan keuangan, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Peneliti, 2024

